



PeTeKa (Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran)

Issn Cetak : 2599-1914 | Issn Online : 2599-1132 | Vol. 9 No. 1 (2026) | 9-28

 DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/ptk.v9i1.9-28>

PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG DALAM ERA GLOBALISASI

Ana Tiara Syalwa*, Afi yatun Kholifah

FAI, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.

 *e-mail: syalwatiara0812203@gmail.com


Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan sistem pendidikan negara maju dan negara berkembang melalui kajian terhadap struktur pendidikan, prinsip penyelenggaraan, implementasi kurikulum, serta problematika utama yang dihadapi. Metode yang digunakan ialah studi pustaka dengan mengumpulkan literatur dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik kredibel yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait potensi pengembangan sistem pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara maju unggul dalam pendanaan pendidikan, kualitas tenaga pendidik, kurikulum berbasis kompetensi, dan integrasi teknologi, sedangkan negara berkembang masih terkendala keterbatasan sarana prasarana, ketidakmerataan kompetensi guru, serta kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Perbandingan dengan sistem pendidikan Australia mengindikasikan bahwa prinsip inklusivitas, fleksibilitas kurikulum, kolaborasi pemangku kepentingan, dan evaluasi berkelanjutan dapat menjadi acuan strategis bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Dengan demikian, reformasi pendidikan di negara berkembang dapat berjalan lebih efektif melalui penguatan kompetensi guru, peningkatan pendanaan, modernisasi kurikulum, serta pemerataan infrastruktur guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berkelanjutan.

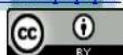
Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Negara Maju, Negara Berkembang, Globalisasi, Kurikulum, Problematika Pendidikan.

Abstract. This study aims to analyze the differences between the education systems of developed and developing countries through a review of the structure of education, the principles of implementation, the implementation of the curriculum, and the main problems faced. The method used is a literature study by collecting literature from books, scientific journals, and credible academic sources, which are then analyzed descriptively and qualitatively to obtain a comprehensive picture of the potential for developing the education system. The results of the study show that developed countries excel in education funding, teacher quality, competency-based curricula, and technology integration, while developing countries are still constrained by limited infrastructure, uneven teacher competency, and access gaps between urban and rural areas. A comparison with the Australian education system indicates that the principles of inclusivity, curriculum flexibility, stakeholder collaboration, and continuous evaluation can serve as strategic references for Indonesia in improving the quality of its education. Thus, education reform in developing countries can be more effective through strengthening teacher competencies, increasing funding, modernizing the curriculum, and equalizing infrastructure to realize quality, relevant, and sustainable education.

Keywords: : Education System, Developed Countries, Developing Countries, Globalization, Curriculum, Educational Issues.

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Kampus Terpadu Jl. Stn Mhd Arief No 32 Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Telp (0634)21696,

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/ptk> ; email : peteka@um-tapsel.ac.id


PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan suatu negara karena berperan dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global. Di era globalisasi, persaingan antarnegara semakin ketat, sehingga setiap negara dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang adaptif, kreatif, dan mampu bersaing di kancah internasional. Globalisasi tidak hanya menuntut kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan abad ke-21, seperti literasi digital, berpikir kritis, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah secara kreatif (Schwab, 2018).

Australia, sebagai salah satu negara maju, memiliki sistem pendidikan yang terstruktur, terstandarisasi, dan didukung oleh pendanaan yang memadai dari pemerintah. Sistem pendidikan di Australia menekankan pemerataan kualitas, inovasi, dan kemandirian belajar. Kurikulum di negara ini bersifat fleksibel, berbasis kompetensi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar global (Department of Education, 2023). Kurikulum Australia menekankan prinsip pemerataan kualitas, inovasi, pembelajaran berbasis kompetensi, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran memungkinkan siswa menguasai literasi digital sejak dini, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja global. Selain itu, pendidikan di Australia juga memperhatikan pengembangan karakter, literasi digital, dan keterampilan sosial, sehingga siswa

tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki kompetensi holistik yang mendukung kesiapan mereka menghadapi dunia kerja internasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurijal (2024) Pendidikan merupakan unsur krusial dalam membentuk individu dan kemajuan suatu bangsa, karena melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan kemampuan, kepribadian, dan keterampilan yang relevan dengan nilai-nilai sosial serta kebutuhan zaman. Sistem pendidikan yang baik tidak hanya memperhatikan metode, fasilitas, dan tujuan, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi serta perubahan lingkungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan, karena secara global Indonesia menempati posisi yang relatif rendah dalam aspek keterampilan kognitif dan daya saing internasional. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan melalui reformasi sistem pendidikan yang terstruktur, baik pada input, proses, maupun output, menjadi langkah penting untuk memperkuat modal sosial masyarakat dan meningkatkan kemampuan bersaing Indonesia di tingkat global (Nurijal, 2024).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aminah Yulianti Dkk. yang menjelaskan tentang pendidikan memiliki peran penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Di negara maju, pendidikan menjadi sarana untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, negara berkembang memanfaatkan pendidikan untuk mengejar ketertinggalan agar dapat sejajar dengan negara-negara maju. Pendidikan sendiri merupakan usaha sadar dan terencana untuk membentuk kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan peserta didik. Setiap

negara merancang sistem pendidikannya berdasarkan berbagai faktor seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan ideologi. Akibat perbedaan latar belakang tersebut, berbagai negara menghadapi tantangan pendidikan yang beragam. Problematika pendidikan juga mencakup ranah yang lebih luas, tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal dan nonformal, karena proses pendidikan pertama kali dialami peserta didik dalam keluarga dan lingkungan masyarakat (Aminah Yulianti dkk., n.d.).

Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam sistem pendidikan mereka. Keterbatasan sarana prasarana, ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kualitas guru yang belum merata, serta implementasi kurikulum yang masih sering berubah menjadi kendala utama. Kurikulum yang diterapkan cenderung padat materi dan kurang kontekstual sehingga belum sepenuhnya mendorong pengembangan keterampilan abad ke-21.

Perbandingan sistem pendidikan antara Australia dan negara berkembang memberikan gambaran tentang praktik-praktik efektif yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara berkembang. Globalisasi juga membuka peluang kerja sama internasional, pertukaran pelajar, dan pemanfaatan teknologi digital, yang dapat menjadi sarana reformasi pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan sistem pendidikan negara maju dan negara berkembang dengan fokus pada struktur pendidikan, prinsip penyelenggaraan, problematika yang muncul, serta implementasi kurikulum.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi strategis bagi negara berkembang dalam memperkuat kebijakan pendidikan, meningkatkan investasi, dan mengadopsi praktik terbaik dari negara maju seperti Australia, tanpa mengabaikan konteks lokal. Pendidikan yang berkualitas menjadi kunci pembangunan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global sekaligus mendukung kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat nasional maupun internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) sebagai metode utama. Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan, telaah, dan analisis literatur dari ebook dan jurnal akademik yang relevan dengan topik perbandingan sistem pendidikan di negara maju dan berkembang dalam era globalisasi. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman teoretis dan konseptual mengenai struktur pendidikan, prinsip penyelenggaraan, implementasi kurikulum, serta problematika yang dihadapi oleh kedua kelompok negara (Creswell, 2014).

Data penelitian diperoleh dari berbagai informasi, seperti google scholar, buku, artikel ebook dan jurnal ilmiah terpercaya yang membahas sistem pendidikan, kebijakan pendidikan, kurikulum, serta tantangan pendidikan di negara maju maupun berkembang. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur secara sistematis, kemudian mengklasifikasikan informasi sesuai dengan tema-tema utama, seperti struktur pendidikan, prinsip pendidikan,

kurikulum, dan problematika pendidikan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan isi literatur secara mendalam, menghubungkan konsep-konsep kunci dari berbagai sumber, serta menarik kesimpulan berdasarkan sintesis pemikiran para ahli. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menyajikan perbandingan sistem pendidikan antara negara maju dan berkembang secara jelas, serta memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan kualitas pendidikan di era globalisasi (Bray, M., Adamson, B., & Mason, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Sistem Pendidikan Di Negara Maju Dan Berkembang

Pendidikan merupakan fondasi penting dalam membentuk masa depan suatu negara. Sistem pendidikan yang bermutu mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berpikir kritis, dan mampu bersaing di tingkat global. Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya reformasi pendidikan dalam beberapa dekade terakhir. Meski demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan segera. Tulisan ini akan membahas perbandingan antara kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dengan sistem pendidikan di sejumlah negara maju, serta memberikan gambaran mengenai pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman mereka (UNESCO., 2021).

Sistem pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan suatu negara. Negara maju dan berkembang

memiliki karakteristik yang berbeda dalam pengelolaan pendidikan, baik dari segi pendanaan, kualitas tenaga pendidik, kurikulum, maupun sarana dan prasarana. Pada negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Jerman, pendidikan umumnya ditopang oleh pendanaan yang tinggi dan stabil sehingga mampu menyediakan fasilitas belajar yang modern dan lengkap. Selain itu, kualitas guru di negara maju sangat diperhatikan melalui proses seleksi yang ketat serta pelatihan berkelanjutan, menjadikan profesi guru memiliki status sosial yang tinggi. Kurikulum pendidikan juga cenderung fleksibel dan berorientasi pada pengembangan kompetensi seperti kreativitas, berpikir kritis, serta pemecahan masalah, bukan hanya hafalan. Akses pendidikan di negara maju merata, dan sebagian besar pendidikan dasar hingga menengah disediakan secara gratis. Hal ini berdampak pada tingginya prestasi siswa dalam asesmen internasional seperti PISA (Tilak, 2018).

Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia, India, dan beberapa negara di Afrika serta Asia Selatan menghadapi tantangan yang cukup besar dalam sektor pendidikan. Keterbatasan anggaran menyebabkan kualitas sarana-prasarana pendidikan tidak merata, terutama di wilayah terpencil. Kualitas guru pun bervariasi, sebagian mengalami keterbatasan pelatihan dan pengembangan profesional. Kurikulum sering kali padat dan berorientasi pada ujian, sehingga proses pembelajaran lebih menekankan hafalan daripada kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Selain itu, kesenjangan akses pendidikan masih terjadi karena faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Beberapa isu seperti tingginya angka putus sekolah, perkawinan anak, dan pekerja anak turut memengaruhi rendahnya angka partisipasi pendidikan. Tantangan-

tantangan tersebut membuat prestasi akademik secara umum masih tertinggal dibandingkan negara maju (Hanushek, E., & Woessmann, 2020).

Perbandingan antara dua kelompok negara ini menunjukkan perbedaan signifikan pada beberapa aspek, seperti pendanaan, kualitas guru, pendekatan kurikulum, infrastruktur, dan pemerataan akses pendidikan. Negara maju unggul dalam integrasi teknologi pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, sementara negara berkembang masih harus menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial. Meski begitu, negara berkembang memiliki peluang besar untuk memperbaiki sistem pendidikannya melalui peningkatan pendanaan, penguatan kompetensi guru, reformasi kurikulum yang berorientasi kompetensi, pembangunan infrastruktur yang merata, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Dengan langkah strategis dan kebijakan yang berkesinambungan, kualitas pendidikan di negara berkembang dapat ditingkatkan sehingga mampu mengejar ketertinggalan dari negara maju.

1) Sistem Pendidikan di Indonesia Saat Ini

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki kualitas pendidikan melalui berbagai inisiatif seperti penerapan Kurikulum Merdeka, program digitalisasi sekolah, serta pengembangan kompetensi guru. Meski demikian, sejumlah persoalan mendasar dalam struktur dan pelaksanaannya masih menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas berbagai kebijakan tersebut.

Sistem pendidikan di Indonesia saat ini sedang berada dalam fase transformasi yang cukup signifikan. Pemerintah terus berupaya

meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan meluncurkan berbagai program strategis, seperti penerapan Kurikulum Merdeka yang bertujuan memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih relevan, kreatif, dan berpusat pada siswa. Selain itu, pemerintah juga menggalakkan program digitalisasi sekolah sebagai langkah adaptasi terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam penyediaan akses perangkat pembelajaran digital, platform pendidikan daring, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pembelajaran (Suryadi, 2021).

Namun, meskipun berbagai upaya tersebut menunjukkan kemajuan, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Kesenjangan akses pendidikan antarwilayah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya literasi digital di sebagian sekolah masih menjadi hambatan utama. Di sisi lain, pengembangan kompetensi guru juga belum sepenuhnya optimal karena tidak semua pendidik mendapatkan kesempatan pelatihan yang merata dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan efektivitas kebijakan pendidikan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Dengan demikian, meskipun pemerintah telah meluncurkan banyak inovasi, persoalan mendasar dalam struktur dan pelaksanaan sistem pendidikan masih perlu ditangani secara serius agar pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai secara menyeluruh (Suryadi, 2021).

2) Akses Dan Ketimpangan Pendidikan

Tantangan utama pendidikan nasional terlihat pada kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan

wilayah terpencil. Siswa di daerah pedesaan sering menghadapi kekurangan fasilitas belajar, minimnya tenaga pendidik berkualitas, serta keterbatasan akses teknologi. Kondisi ini menciptakan ketidakmerataan hasil belajar antara satu daerah dan daerah lainnya.

Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi salah satu tantangan paling serius dalam sistem pendidikan Indonesia. Perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan tampak jelas dalam hal fasilitas, tenaga pendidik, dan pemanfaatan teknologi. Di wilayah terpencil, banyak sekolah yang belum memiliki sarana prasarana memadai seperti ruang kelas layak, laboratorium, perpustakaan, maupun akses internet. Keterbatasan ini semakin diperburuk oleh kurangnya tenaga pendidik berkualitas yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil, sehingga proses pembelajaran tidak berlangsung secara optimal. Selain itu, penggunaan teknologi pendidikan yang semakin penting di era digital belum dapat dinikmati secara merata, menyebabkan kesenjangan kemampuan belajar antarsiswa dari berbagai wilayah. Dampaknya, hasil belajar di daerah terpencil sering tertinggal dibandingkan siswa di perkotaan, menciptakan ketidakmerataan kualitas pendidikan secara nasional (Saragih, 2020).

3) Peran Guru Dan Mutu Pengajaran

Guru merupakan elemen kunci dalam peningkatan mutu pendidikan karena mereka berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Namun, kualitas pengajaran di Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor kompetensi guru yang belum merata. Banyak guru belum

mendapatkan pelatihan profesional yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan. Program pelatihan yang ada selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek administratif seperti penyusunan laporan atau pemenuhan dokumen, bukan pada peningkatan kemampuan pedagogis yang diperlukan untuk menghadapi perubahan zaman. Keterampilan mengajar berbasis teknologi, pendekatan pembelajaran aktif, maupun metode inovatif lainnya masih belum dikuasai secara memadai oleh sebagian guru. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pembelajaran di kelas dan menimbulkan kesenjangan kualitas antara sekolah yang memiliki guru berkompeten dengan yang tidak. Untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan.

Guru memiliki posisi sentral dalam peningkatan kualitas pendidikan. Namun, banyak guru belum memperoleh pelatihan berkelanjutan yang memadai. Program pelatihan guru masih terfokus pada aspek administratif, bukan peningkatan kompetensi pedagogis atau kemampuan mengajar yang relevan dengan kebutuhan era modern (Suharti, 2018).

4) Perbandingan Dengan Sistem Pendidikan Negara Lain

Untuk menempatkan kondisi Indonesia dalam perspektif global, dapat dilakukan perbandingan dengan negara-negara yang dikenal memiliki kualitas pendidikan unggul, seperti Finlandia, Jepang, dan Singapura.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pendidikan

Negara	Karakteristik Sistem Pendidikan	Pelajaran Untuk Indonesia
Finlandia	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pendidikan paling maju di dunia. - Guru dihargai tinggi dan hanya diisi lulusan terbaik. - Guru diberikan kebebasan menentukan strategi & materi pembelajaran. - Tidak ada ujian standar nasional. - Pembelajaran bersifat personal, kolaboratif, dan mendorong rasa ingin tahu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berikan ruang inovasi lebih luas bagi guru. - Kurangi ketergantungan pada ujian standar dan tingkatkan pembelajaran bermakna. - Dorong otonomi sekolah dalam mengembangkan kurikulum lokal
Jepang	<ul style="list-style-type: none"> - Menekankan kedisiplinan, etika, dan kerja keras. - Siswa dibiasakan nilai moral & tanggung jawab sosial sejak dini. - Budaya belajar mandiri dan semangat pantang menyerah. - Tingkat literasi dan numerasi sangat tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasikan pendidikan karakter secara berkelanjutan. - Tumbuhkan budaya belajar mandiri. - Tingkatkan literasi & numerasi melalui metode kreatif dan efektif.
Singapura	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pendidikan sangat terstruktur dan modern. - Dukungan teknologi canggih dalam pembelajaran. - Pemerintah berinvestasi besar pada pelatihan guru dan teknologi pembelajaran. - Sekolah memanfaatkan data & analisis untuk memantau perkembangan siswa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gunakan evaluasi berbasis data untuk memantau siswa. - Tingkatkan pelatihan guru berbasis teknologi. - Optimalkan teknologi untuk pemerataan akses pendidikan berkualitas.

B. Struktur dan prinsip utama pendidikan di negara maju (Australia), dan negara berkembang (Indonesia)

1) Australia

Kurikulum di Australia dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada masing-masing negara bagian dalam implementasinya.

a) Struktur Utama Kurikulum

Struktur utama kurikulum mencakup:

(1) Australia Curriculum

Standar nasional yang mencakup mata pelajaran inti dan prioritas pendidikan nasional yang dikelompokkan dalam tiga bidang utama:

(a) Mata pelajaran utama:

- Bahasa Inggris
- Matematika

- Sains
- Humaniora dan Ilmu Sosial
- Seni
- Teknologi
- Kesehatan dan Pendidikan Jasmani (ACARA, 2021).
- (b) Kemampuan umum (general capabilities)
 - Literasi dan numerasi
 - Pemikiran kritis dan kreatif
 - Etika dan kesadaran sosial
 - Penggunaan teknologi informasi (Scouler, C., & Heard, 2018).
- (c) Prioritas lintas kurikulum (cross-curriculum priorities):

- Keberlanjutan lingkungan
- Pemahaman budaya Aborigin dan Torres Strait Islander
- Keterlibatan dengan Asia (Reid, 2019).

Australia memiliki Australian Curriculum yang dikembangkan oleh Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA) sebagai standar nasional, namun setiap negara bagian dan teritori memiliki otonomi dalam mengadaptasi dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal (ACARA, 2021). Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam kurikulum, metode pengajaran, serta sistem asesmen di berbagai wilayah.

Sistem pendidikan di Australia diatur dalam tingkat negara bagian dan teritori, yang berarti bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kendali penuh atas implementasi kurikulum. Setiap negara bagian dan teritori memiliki dewan pendidikan sendiri yang bertanggung jawab atas kebijakan kurikulum dan asesmen (Lingard, B., Thompson, G., & Sellar, 2017).

Misalnya:

- Victoria menggunakan Victorian Curriculum, yang merupakan adaptasi dari Australian Curriculum dengan tambahan konten dan fokus khusus pada kebutuhan lokal (VCAA, 2021).

Perbandingan Kurikulum Australia dan Indonesia

- New South Wales (NSW) memiliki NSW Syllabus, yang dikembangkan oleh NSW Education Standards Authority (NESA) dengan menyesuaikan Australian Curriculum terhadap kebijakan pendidikan negara bagian (NESA, 2022).
- Queensland menerapkan Queensland Curriculum and

Assessment Authority (QCAA) syllabus, yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam pendekatan pengajaran dan asesmen (QCAA, 2021).

Adapun dalam state and territory curricula, memiliki kebijakan bahwa setiap negara bagian memiliki kebebasan masing-masing dalam pendidikan yang meliputi:

- Menentukan metode pengajaran: Beberapa negara bagian menekankan pendekatan berbasis proyek (project-based learning), sementara yang lain lebih berfokus pada pembelajaran berbasis tes (Forster, 2019).
- Menyesuaikan asesmen dan ujian: Misalnya, Victoria menggunakan VCE (Victorian Certificate of Education) sebagai ujian akhir sekolah menengah, sementara NSW menggunakan HSC (Higher School Certificate) (Donnelly, Kevin, 2014).
- Mengintegrasikan kebijakan pendidikan lokal: Beberapa negara bagian memiliki fokus lebih besar pada pendidikan komunitas Aborigin dan Torres Strait Islander dibandingkan yang lain (Shay, M., & Wickes, 2017).

Pengembangan kurikulum di Australia dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang beragam di seluruh negeri. Sistem pendidikan Australia terbagi menjadi beberapa jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Kurikulum nasional, yang dikenal sebagai Australian Curriculum, menjadi pedoman utama bagi pengembangan program pembelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah. Menurut Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA, 2021), kurikulum ini dirancang agar guru dan lembaga pendidikan memiliki panduan

yang jelas dalam merancang kegiatan belajar sesuai standar nasional.

Salah satu ciri penting kurikulum Australia adalah pemisahan yang jelas antara konten dan kemampuan. Konten mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai siswa, sedangkan kemampuan menekankan bagaimana siswa dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam berbagai konteks. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa tidak hanya diharapkan menghafal informasi, tetapi juga memahami dan mengaplikasikannya dalam situasi nyata (Gonski, D., Arcus, T., 2018).

Selain itu, kurikulum Australia menerapkan pendekatan yang inklusif dan beragam, dengan memperhatikan kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Menurut Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL, 2019), sekitar 15% siswa di Australia memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, kurikulum dirancang dengan strategi pengajaran yang fleksibel dan dapat disesuaikan, termasuk pemanfaatan teknologi, yang terbukti meningkatkan keterlibatan serta hasil belajar siswa (Hattie, 2012)

Pelaksanaan kurikulum juga melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. ACARA bekerja sama dengan dewan pendidikan negara bagian dan teritori untuk memastikan kurikulum yang diterapkan relevan dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Contohnya, di New South Wales terdapat program Quality Teaching Framework yang bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran melalui kerja sama antara guru dan pemimpin sekolah (NSW Department of

Education, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di Australia tidak bersifat top-down semata, melainkan melibatkan partisipasi berbagai pihak terkait.

Evaluasi dan peninjauan menjadi bagian penting dari pengembangan kurikulum. ACARA secara rutin meninjau kurikulum agar konten dan kemampuan yang diajarkan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan laporan tahunan ACARA, lebih dari 90% guru menyatakan bahwa kurikulum nasional memberikan panduan yang jelas dan bermanfaat dalam kegiatan pengajaran mereka (ACARA, 2021). Dengan demikian, pengembangan kurikulum di Australia tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga menekankan peningkatan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang terus berubah.

b) Prinsip Utama Dalam Pengembangan Kurikulum Di Australia

Prinsip fundamental dalam pengembangan kurikulum Australia berorientasi pada upaya mewujudkan capaian pembelajaran yang bermutu, relevan, dan dapat diakses oleh seluruh peserta didik. Salah satu asas paling esensial ialah asas inklusivitas, yang menekankan urgensi penyediaan kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kemampuan individual. Productivity Commission (2019) menegaskan bahwa disparitas capaian pendidikan antar kelompok siswa masih menjadi isu signifikan dalam konteks Australia. Oleh sebab itu, perancangan kurikulum difokuskan pada pemberian

peluang yang setara agar setiap peserta didik dapat mengoptimalkan potensi belajarnya.

Selain inklusivitas, prinsip relevansi turut menjadi pilar kunci dalam konstruksi kurikulum. Kurikulum Australia dirumuskan untuk merespons kebutuhan, perkembangan, serta tantangan masyarakat kontemporer. Misalnya, meningkatnya penetrasi teknologi dalam aktivitas sehari-hari mendorong integrasi keterampilan digital sebagai elemen inti dalam struktur kurikulum. Menurut (ACARA, 2021), Saat ini, 70 % sebagian besar siswa di Australia memperoleh pembelajaran terkait keterampilan digital sebagai bagian integral dari pendidikan mereka. Kondisi ini mencerminkan bahwa kurikulum tidak semata-mata menekankan penguasaan teori akademik, tetapi juga menyiapkan keterampilan praktis yang relevan dengan tuntutan dunia kerja.

Selain itu, prinsip keberlanjutan menjadi perhatian utama dalam penyusunan kurikulum. Mengingat meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan dan perubahan iklim, kurikulum kini memasukkan pendidikan mengenai keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis. Laporan dari Australian Council for Educational Research menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah di Australia telah mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam program pembelajaran mereka. Hal ini menegaskan bahwa tujuan kurikulum tidak hanya untuk membekali siswa dengan pengetahuan, tetapi juga

menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Prinsip kolaborasi juga menjadi unsur penting dalam pengembangan kurikulum Australia. Kerja sama antara guru, orang tua, dan komunitas diyakini krusial untuk memastikan kurikulum yang diterapkan tetap relevan dan efektif. Penelitian AITSL (2019) menemukan bahwa sekolah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kurikulum cenderung memperoleh hasil belajar yang lebih optimal, menunjukkan bahwa partisipasi bersama dapat meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, evaluasi berkelanjutan merupakan komponen penting dalam desain kurikulum Australia. Kurikulum perlu ditinjau secara periodik untuk memastikan bahwa materi pembelajaran dan metode pengajaran tetap sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan ilmu pengetahuan. ACARA secara rutin melakukan survei dan penelitian untuk menilai efektivitas kurikulum dan praktik pengajaran di seluruh negeri. Berdasarkan survei terbaru, lebih dari 85% guru menyatakan bahwa kurikulum nasional mendukung mereka dalam merancang program pembelajaran yang efektif dan relevan (ACARA, 2021). Dengan adanya evaluasi berkelanjutan, kurikulum di Australia dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pendidikan yang dinamis.

2) Indonesia

a) Struktur Utama Kurikulum Indonesia

Kurikulum nasional di Indonesia masih didominasi pendekatan kognitif dan kegiatan menghafal. Walaupun Kurikulum Merdeka mulai mendorong model pembelajaran berbasis proyek dan pemahaman konsep, penerapannya belum sepenuhnya merata. Banyak pendidik masih menggunakan metode pengajaran tradisional dengan pola ceramah satu arah karena keterbatasan pelatihan maupun fasilitas.

Struktur utama kurikulum Indonesia mencakup berbagai aspek penting dalam sistem pendidikan terus berkembang dari masa yang ke masa Kurikulum yang diterapkan menyesuaikan dengan kebutuhan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah struktur utama kurikulum Indonesia: Komponen Mata Pelajaran Utama

(1) Mata pelajaran inti :

- (a) Pendidikan Agama
- (b) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
- (c) Bahasa Indonesia
- (d) Matematika
- (e) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- (f) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
- (g) Seni dan Budaya
- (h) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)
- (i) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., 2013)

(2) Kompetensi dasar dan kemampuan umum :

- (a) Literasi dan numerasi
- (b) Pemecahan masalah dan berpikir kritis
- (c) Kreativitas dan inovasi
- (d) Keterampilan sosial dan komunikasi
- (e) Penggunaan teknologi digital pembelajaran (Mulyasa, 2013)

(3) Prioritas pendidikan nasional dan nilai karakter :

- (a) Penguatan Profil Pelajar Pancasila
- (b) Pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal
- (c) Pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif
- (d) Pengembangan keterampilan abad ke-21 (Kemendikbud, 2022)

Struktur kurikulum Indonesia terus mengalami penyesuaian untuk menyiapkan peserta didik yang berdaya saing, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan global.

b) Prinsip Utama Dalam Pengembangan Kurikulum Indonesia

Pengembangan kurikulum di Indonesia utama yang didasarkan pada prinsip-prinsip menyesuaikan dengan kebutuhan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tantangan global. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam pengembangan kurikulum Indonesia:

- (1) Berorientasi pada tujuan pendidikan nasional
 - (a) Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - (b) Bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk peserta

- didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
- (2) Fleksibilitas dan kontekstualitas
- (a) Memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik
- (b) Diterapkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Merdeka (Kemendikbud, 2022).
- (3) Prioritas pendidikan nasional dan nilai karakter
- (a) Mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi.
- (b) Fokus pada penguatan kompetensi kognitif, sosial, dan karakter melalui pendekatan pembelajaran aktif (Mulyasa, 2013).
- (4) Pendidikan berpusat pada peserta didik
- (a) Menekankan pembelajaran aktif dengan pendekatan konstruktivis, seperti Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dan pembelajaran berbasis proyek.
- (b) Guru berperan sebagai fasilitator dalam mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah (Ghony, M. D., & Almanshur, 2010).
- (5) Integrasi nilai-nilai karakter dan budaya bangsa
- (a) Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai

landasan pembentukan karakter peserta didik.

- (b) Menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, keberagaman budaya, dan kearifan lokal dalam proses pembelajaran (Kemendikbud, 2022).
- (6) Pendidikan berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan
- (a) Mengakomodasi perkembangan teknologi, digitalisasi pendidikan, dan kebutuhan pasar
- (b) Menyesuaikan dengan kebijakan global dan nasional dalam bidang pendidikan.

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam setiap perubahan kurikulum di Indonesia, memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

C. Problematika Pendidikan Di Negara Maju Dan Berkembang

1) Negara Maju

Negara-negara yang termasuk kategori maju adalah negara-negara yang telah mampu menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, negara-negara ini ditandai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi, kondisi ekonomi yang stabil, serta pendapatan per kapita yang relatif tinggi. Perbedaan antara negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang tidak didasarkan pada martabat manusia, melainkan pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menguasai dan menerapkan IPTEK untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya (Ni Luh Gede Karang Widiastuti, 2019).

Dalam konteks ini, negara maju dapat diartikan sebagai negara yang mampu mengelola berbagai sektor industri, termasuk yang berasal dari negara lain, sehingga dapat diolah secara efektif di dalam negeri. Di negara maju, tingkat pengangguran umumnya rendah karena pemerintah menyediakan berbagai peluang kerja bagi seluruh penduduk, sehingga setiap individu dapat berkontribusi terhadap produktivitas nasional. Hal ini berbeda dengan kondisi di negara berkembang, di mana pengangguran masih menjadi persoalan.

Beberapa ciri utama negara maju antara lain:

- a) Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal.
- b) Kemampuan mengelola masalah kependudukan.
- c) Tingginya produktivitas masyarakat yang didominasi oleh produksi barang dan jasa.
- d) Tingkat dan kualitas hidup masyarakat yang tinggi.
- e) Ekspor yang berfokus pada produk industri dan jasa.
- f) Tersedianya fasilitas umum yang memadai.
- g) Tingginya kesadaran hukum, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- h) Tingkat pendidikan yang relatif tinggi.
- i) Pendapatan per kapita yang relatif tinggi.
- j) Kesehatan masyarakat yang baik.

Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas penduduk suatu negara. Di negara maju, masyarakat umumnya menyadari pentingnya pendidikan dan penguasaan IPTEK. Hal ini

tercermin dari tingginya angka partisipasi belajar, yang didukung oleh sistem pendidikan yang baik serta alokasi anggaran pendidikan yang memadai dari pemerintah. Meskipun negara maju umumnya memiliki sistem pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang, tidak berarti mereka bebas dari persoalan. Beberapa masalah pendidikan tetap muncul, meskipun berbeda-beda tingkat dan bentuknya.

Beberapa problematika pendidikan yang kerap ditemui di negara maju antara lain:

a) Ketidaksetaraan Pendidikan

Walaupun kualitas pendidikan di negara maju tergolong tinggi, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi isu penting. Faktor ekonomi, lokasi geografis, serta latar belakang sosial dapat memengaruhi kesempatan belajar yang dimiliki siswa. Untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah dapat diterapkan, antara lain: pemberian beasiswa dan bantuan finansial bagi keluarga berpenghasilan rendah, pelaksanaan program bimbingan dan mentoring untuk siswa yang berisiko, serta peningkatan akses terhadap teknologi melalui penyediaan perangkat komputer dan koneksi internet yang memadai.

b) Biaya Pendidikan Tinggi

Di beberapa negara maju, biaya pendidikan tinggi dapat sangat tinggi, sehingga menjadi beban finansial yang signifikan bagi mahasiswa dan keluarga. Utang mahasiswa pun menjadi masalah yang serius. Upaya solusi meliputi perluasan program beasiswa dan bantuan finansial,

serta penerapan kebijakan pembiayaan yang lebih terjangkau untuk menekan beban biaya dan mengurangi ketergantungan pada utang mahasiswa.

c) Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan

Teknologi memiliki peran yang penting dalam mendukung proses belajar-mengajar, namun penerapannya belum merata di seluruh wilayah negara maju. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan internet, sehingga menciptakan kesenjangan digital. Solusi yang dapat dilakukan adalah menjamin pemerataan akses terhadap teknologi, serta mengintegrasikan perangkat digital sebagai sarana pendukung dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pendidikan (Ni Luh Gede Karang Widiastuti, 2019).

2) Negara Berkembang

Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan negara-negara dengan standar hidup yang relatif rendah, sektor industri yang belum berkembang secara optimal, Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) pada tingkat menengah ke bawah, serta pendapatan per kapita yang rendah (Sukmayani, 2008).

Menurut Simon Kuznets, sebagaimana dikutip oleh Meity Mudikwaty dan Utep Badrusalam, negara berkembang adalah negara yang belum mampu menyediakan taraf hidup yang layak bagi sebagian besar penduduknya, sehingga menimbulkan ketidakmerataan dalam berbagai sektor (Mudikwaty, M dan Badrusalam, 2019).

Dengan demikian, negara berkembang dapat dipahami sebagai

negara yang belum mencapai tingkat negara maju, namun juga tidak termasuk kategori negara gagal. Posisi negara berkembang berada di antara negara maju dan negara gagal. Ciri-ciri utama negara berkembang meliputi:

- a) Politik: Secara umum baru meraih kemerdekaan atau terbebas dari penjajahan Barat.
- b) Ekonomi: Secara umum masih miskin dan sangat bergantung pada sumber daya alam.
- c) Demografi: Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang didorong oleh angka kelahiran yang tinggi.
- d) Budaya: Tetap mempertahankan warisan budaya tradisional secara konsisten.

Kebijakan pendidikan di negara-negara berkembang umumnya merupakan warisan dari sistem pendidikan kolonial. Hal ini disebabkan karena saat pertama kali merdeka, negara-negara tersebut belum memiliki kesempatan untuk merancang kebijakan pendidikan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakatnya. Dengan kata lain, kemerdekaan di bidang politik tidak secara otomatis diikuti oleh kemerdekaan di bidang lain, termasuk pendidikan.

a) Problematika Di Negara Berkembang

Permasalahan pendidikan di negara berkembang umumnya lebih kompleks dan beragam dibandingkan dengan yang terjadi di negara maju. Negara-negara ini menghadapi berbagai tantangan khas dalam upaya meningkatkan

mutu sistem pendidikan mereka. Beberapa permasalahan pendidikan yang sering muncul.

b) Akses Terbatas

Sejumlah anak di negara berkembang masih mengalami kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas, disebabkan oleh faktor seperti jarak yang jauh ke sekolah, terbatasnya fasilitas pendidikan, serta tingginya biaya pendidikan. Kondisi sosial, seperti pernikahan dini, pekerja anak, dan diskriminasi gender, juga dapat memperburuk situasi ini. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan aksesibilitas, misalnya dengan membangun lebih banyak sekolah, terutama di wilayah pedesaan, menyediakan transportasi yang terjangkau bagi siswa, serta memberikan bantuan finansial atau beasiswa bagi keluarga kurang mampu agar seluruh anak dapat mengenyam pendidikan.

c) Kualitas Pendidikan Rendah

Banyak sekolah di negara berkembang menghadapi kendala berupa fasilitas yang kurang memadai, guru dengan kualifikasi terbatas, serta kurikulum yang tidak selalu mengikuti perkembangan zaman. Kekurangan sumber daya, pelatihan guru yang terbatas, dan standar pendidikan yang rendah dapat menyebabkan mutu pendidikan menjadi kurang optimal. Solusi yang dapat diterapkan meliputi pelatihan dan pengembangan guru secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, serta pembaruan kurikulum agar lebih relevan

dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia kerja.

d) Keterbatasan Sumber Daya Keuangan

Negara berkembang kerap menghadapi keterbatasan anggaran untuk sektor pendidikan. Terbatasnya dana ini dapat menghambat peningkatan fasilitas sekolah, pelatihan guru, dan penyediaan materi pembelajaran (Batubara, 2018). Upaya untuk mengatasi masalah ini meliputi peningkatan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN, serta pencarian sumber pendanaan tambahan melalui kerja sama dengan sektor swasta atau organisasi internasional.

e) Keterbatasan Pelatihan Guru

Sering kali, guru di negara berkembang belum memiliki pelatihan yang memadai atau kualifikasi yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas. Masalah rekrutmen guru yang tidak optimal juga menjadi kendala, terutama di wilayah pedesaan. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan program pengembangan profesionalisme guru. Program ini tidak hanya melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam praktik pengajaran, tetapi juga dapat dijadikan persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik. Pelatihan yang efektif akan membantu guru meningkatkan kualitas pengajaran dan kompetensi profesional mereka.

f) Kekurangan Bahan Ajar dan Teknologi

Banyak sekolah di negara berkembang memiliki keterbatasan akses terhadap bahan ajar, buku teks, dan

teknologi pendidikan. Kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi ini dapat menjadi penghambat perkembangan pendidikan di era digital. Salah satu solusi adalah pengembangan bahan ajar berbasis digital yang dapat diakses secara daring, sehingga siswa dan guru memiliki akses terhadap materi pembelajaran yang lebih beragam, interaktif, dan mudah diperoleh.

D. Perbedaan Implementasi Kurikulum Di Berbagai Negara Bagian Dan Teritori Di Australia Dan Implementasi Kurikulum Di Indonesia.

1) Implementasi Kurikulum di Australia

Kurikulum di Australia diatur secara nasional melalui Australian Curriculum, namun setiap negara bagian dan teritori memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan implementasinya sesuai kebutuhan lokal. Fleksibilitas ini memungkinkan setiap wilayah untuk memilih metode pengajaran, sistem penilaian, dan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Beberapa negara bagian menekankan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), sementara yang lain lebih menitikberatkan pada pembelajaran berbasis evaluasi dan ujian formal (Forster, 2019). Selain itu, sistem ujian akhir juga berbeda antar wilayah; misalnya, Victoria menggunakan VCE (Victorian Certificate of Education), sedangkan New South Wales menggunakan HSC (Higher School Certificate) (Donnelly, Kevin, 2014).

Selain itu, beberapa negara bagian mengintegrasikan kebijakan pendidikan lokal ke dalam kurikulum, terutama terkait pendidikan

komunitas Aborigin dan Torres Strait Islander, sehingga siswa dapat memahami dan menghargai budaya lokal. Kurikulum Australia menekankan pendekatan berpusat pada siswa, di mana guru berperan sebagai fasilitator dalam mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah, serta mengembangkan keterampilan abad ke-21. Pendekatan inklusif dan keberlanjutan juga menjadi fokus, termasuk perhatian terhadap siswa berkebutuhan khusus dan integrasi pendidikan lingkungan.

2) Implementasi Kurikulum di Indonesia

Kurikulum di Indonesia diterapkan secara nasional melalui Kurikulum Nasional yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Implementasinya lebih seragam di seluruh provinsi, meskipun terdapat penyesuaian lokal yang terbatas. Kurikulum Indonesia mencakup mata pelajaran inti seperti Pendidikan Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, PJOK, dan TIK (Kemendikbud, 2013). Selain itu, kurikulum juga menekankan kompetensi dasar dan kemampuan umum, seperti literasi dan numerasi, pemecahan masalah, kreativitas, keterampilan sosial, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran (Mulyasa, 2013).

Kurikulum Indonesia juga menekankan prioritas pendidikan nasional dan penguatan nilai karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal, pembelajaran kolaboratif, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 (Kemendikbud, 2022). Pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik diterapkan

melalui metode konstruktivis dan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), dengan guru sebagai fasilitator yang mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah (Ghoni, 2010).

3) Perbandingan Implementasi Kurikulum

Secara umum, terdapat beberapa perbedaan antara implementasi kurikulum di Australia dan Indonesia. Australia memberikan fleksibilitas lebih besar kepada negara bagian dan teritori dalam penentuan metode pengajaran dan sistem asesmen, sedangkan Indonesia menerapkan kurikulum secara terpusat dengan penyesuaian lokal terbatas. Sistem ujian di Australia berbeda antar wilayah, sedangkan Indonesia menggunakan ujian nasional yang relatif seragam. Kedua negara menekankan pembelajaran berpusat pada siswa, tetapi Australia lebih menonjolkan pembelajaran berbasis proyek dan inklusi, sementara Indonesia lebih fokus pada pendekatan konstruktivis berbasis CBSA. Selain itu, Australia mengintegrasikan pendidikan budaya lokal (Aborigin dan Torres Strait Islander) serta pendidikan keberlanjutan secara lebih luas, sedangkan Indonesia menekankan pendidikan berbasis kearifan lokal nusantara dengan integrasi isu lingkungan yang masih berkembang.

Implementasi kurikulum di Australia dan Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan meskipun keduanya sama-sama menekankan pembelajaran berpusat pada siswa. Di Australia, Australian Curriculum diterapkan secara nasional namun memberikan fleksibilitas tinggi bagi negara bagian dan teritori untuk menyesuaikan metode pengajaran, sistem asesmen, dan integrasi kebijakan pendidikan

lokal, termasuk perhatian pada pendidikan Aborigin dan Torres Strait Islander serta pendidikan keberlanjutan. Sementara itu, kurikulum Indonesia diterapkan secara seragam di seluruh wilayah dengan penyesuaian lokal terbatas, menekankan kompetensi dasar, kemampuan abad ke-21, pendidikan karakter, dan pendekatan konstruktivis berbasis Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Perbandingan ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah pendidikan masing-masing negara, di mana Australia lebih menekankan fleksibilitas dan adaptasi lokal, sedangkan Indonesia lebih menekankan keseragaman nasional dan penguatan nilai karakter serta kearifan lokal.

SIMPULAN

Analisis artikel ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan negara maju lebih terstruktur, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan global. Kurikulum di negara maju berbasis kompetensi, mendorong inovasi, pemerataan kualitas, dan kemandirian belajar, serta didukung oleh pendanaan dan kebijakan pemerintah yang stabil. Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, ketimpangan akses pendidikan, kualitas guru yang belum merata, dan kurikulum yang cenderung padat materi serta kurang kontekstual, sehingga belum sepenuhnya mendorong keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, sistem pendidikan negara berkembang masih perlu penguatan agar mampu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan mampu

bersaing secara global Perbandingan antara sistem pendidikan negara maju seperti Australia dan negara berkembang seperti Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam hal pendanaan, kualitas tenaga pendidik, pemerataan akses, serta efektivitas implementasi kurikulum.

Australia berhasil membangun sistem pendidikan yang terstruktur, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sedangkan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana, ketidakmerataan kompetensi guru, serta kesenjangan akses pendidikan antara wilayah.

Hasil kajian studi pustaka mengungkapkan bahwa keunggulan sistem pendidikan negara maju terletak pada fleksibilitas kurikulum berbasis kompetensi, kolaborasi pemangku kepentingan, evaluasi berkelanjutan, dan integrasi teknologi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi acuan strategis bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Secara keseluruhan, reformasi pendidikan di negara berkembang akan lebih efektif apabila difokuskan pada peningkatan pendanaan, penguatan kompetensi guru, modernisasi kurikulum, serta pemerataan infrastruktur pendidikan. Dengan langkah-langkah tersebut, negara berkembang berpotensi mewujudkan pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berkelanjutan, sekaligus mampu meningkatkan daya saing di era globalisasi.

Pemerintah perlu meningkatkan pendanaan pendidikan secara bertahap dan merata, terutama untuk daerah terpencil, guna memperkuat sarana prasarana, fasilitas belajar, serta akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik. Peningkatan kompetensi

guru harus menjadi fokus utama, melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, workshop pedagogik, dan pembinaan profesional agar kualitas pembelajaran semakin optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Modernisasi kurikulum perlu terus dilakukan dengan mengadopsi prinsip kurikulum negara maju seperti Australia, yaitu fleksibilitas, berbasis kompetensi, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan abad ke-21. Integrasi teknologi dalam pendidikan harus diperluas, baik dalam proses pembelajaran, evaluasi, maupun manajemen sekolah, agar siswa dapat berkembang sesuai tuntutan era digital. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan sektor swasta perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan serta mendukung pelaksanaan kurikulum secara optimal.

Negara berkembang perlu memperkuat kebijakan pendidikan nasional dengan menitikberatkan pada pemerataan akses, peningkatan kualitas guru, dan modernisasi kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Selain itu, peningkatan investasi pendidikan harus menjadi prioritas untuk mendukung fasilitas, teknologi, dan pelatihan guru secara merata di seluruh wilayah. Praktik-praktik terbaik dari negara maju, seperti fleksibilitas kurikulum, pembelajaran berbasis kompetensi, dan integrasi teknologi, dapat diadopsi namun tetap disesuaikan dengan konteks lokal dan budaya setempat. Lebih jauh, pendidikan abad ke-21, termasuk literasi digital, berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas, perlu dijadikan fokus utama agar peserta didik mampu bersaing secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- ACARA. (2021). Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. The Australian Curriculum: Learning Areas, General Capabilities and Cross-Curriculum Priorities.
- Aminah Yulianti dkk. (n.d.). Problematika Pendidikan Di Negara Maju Dan Berkembang. Jurnal Pendidikan Islam.
- Batubara, D. S. (2018). Kompetensi teknologi informasi dan komunikasi guru SD/MI. (Potret, Faktorfaktor, Dan Upaya Meningkatkan), 48–65.
- Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (2014). Comparative Education Research: Approaches and Methods. Springer. [Ebook].
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Sage Publications. [Ebook/Jurnal].
- Department of Education, S. and E. (2023). Australian Education System Overview. Australian Government.
- Donnelly, Kevin, and K. W. (2014). Review of the Australian Curriculum: Final Report. Australian Government, Department of Education.
- Forster, J. (2019). Curriculum policy differences across Australian states and territories. Australian Education Review.
- Ghoni, H. (2010). Pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Ar-Ruzz Media.
- Gonski, D., Arcus, T., Boston, K., Gould, V., Johnson, W., O'Brien, L., Perry, L., & Roberts, M. (2018). Through growth to achievement: Report of the review to achieve educational excellence in Australian schools. Australian Government, Department of Education and Training.
- Hanushek, E., & Woessmann, L. (2020). The Economics of International Differences in Educational Achievement. Elsevier.
- Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. Routledge.
- Kemendikbud. (2022). Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Kurikulum 2013: Kompetensi dasar sekolah dasar dan menengah. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Lingard, B., Thompson, G., & Sellar, S. (2017). Education policy and governance in Australia: Federalism, state and territory autonomy. Routledge.
- Mudikwaty, M dan Badrusalam, U. (2019). Super Complete IPS. Depok: Sahabat Belajar Cerdas.
- Mulyasa, E. (2013). Pengembangan dan implementasi Kurikulum. PT Remaja Rosdakarya.
- Ni Luh Gede Karang Widiastuti. (2019). Modul Perspektif Global & Problematika Pendidikan. (Denpasar: Universitas Dwijendra, 2019), h 28.
- Nurijal. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Pendidikan Negara-Negara Maju Sebagai Komparasi Kemajuan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Biologi Babasal.

- Reid, A. (2019). Cross-curriculum priorities in the Australian Curriculum: Sustainability, Indigenous cultures, and Asia literacy. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.
- Saragih, S. (2020). Ketimpangan Pendidikan di Indonesia: Analisis dan Solusi. Jakarta: Prenada Media.
- Schwab, K. (2018). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
- Scoular, C., & Heard, R. (2018). Developing general capabilities in the Australian Curriculum: Literacy, numeracy, critical and creative thinking, ethical understanding and ICT capability. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.
- Shay, M., & Wickes, J. (2017). Aboriginal identity in education settings: Privileging our stories as a way of deconstructing the past and re-imagining the future. *The Australian Educational Researcher*, 44(1), 107–122.
- Suharti, S. (2018). "Teacher Professional Development in Indonesia." *Journal of Education Policy*, 33(4), 541–558.
- Sukmayani, R. dkk. (2008). Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Suryadi, A. (2021). Transformasi Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Jakarta: Prenada Media.
- Tilak, J. B. G. (2018). Education and Development in the Global South. Routledge.
- UNESCO. (2021). Global Education Monitoring Report. UNESCO.
- Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA). (2021). Victorian Curriculum F-10.